



Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kader Partai Politik Terhadap Manajemen Pembinaan Kader Partai Politik dalam Mewujudkan Kinerja Kader Partai (Studi Kasus Kinerja Kader Partai Golkar dalam Pencapaian Hasil Pilkada di Kabupaten Garut)

Samsudin¹, Jusman Iskandar², Doddy Hermana³

^{1, 2, 3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹24091118025@pasca.uniga.ac.id

²jusman.iskandar@uniga.ac.id

³doddy.hermana@uniga.ac.id

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasari fenomena permasalahan belum baiknya kinerja kader partai yang diduga disebabkan belum optimalnya manajemen dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah kader partai Golkar yang ada di Kabupaten Garut sebanyak 91 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi lapangan, meliputi observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil deskripsi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan kader partai dalam mewujudkan kinerja kader partai sebesar 81,77%, sedangkan sisanya sebesar 18,83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Adapun hasil pengujian sub hipotesis menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa kinerja kader partai dapat dipengaruhi oleh sejauhmana manajemen dan kebijakan pembinaan kader partai. Berdasarkan temuan permasalahan, saran yang disampaikan peneliti pada pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi: Meningkatkan kompetensi SDM, Anggaran keuangan harus mengutamakan sasaran atau kebijakan, dan memperluas jangkauan sosisialisasi kebijakan 2) Partai dapat berperan menyediakan data-data diperlukan dalam melakukan perencanaan sasaran kegiatan 3) Partai membangun koordinasi dan melakukan monitoring serta tindak lanjut perbaikan/koreksi berdasarkan hasil evaluasi, 4) Partai mengupayakan bantuan agar kader dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan 5) Pengembangan bagi yang bekerja dibawah standar dengan mengikuti program pelatihan dan pengembangan

Kata Kunci: Kinerja Kader, Manajemen, Pelaksanaan Kebijakan, Pembinaan.

1. Pendahuluan

Demokrasi dan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari sistem politik dan sistem kepartaian. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-

fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. Sementara itu, suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan *adaptabel*, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.

Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. *Pertama*, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. *Kedua*, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik .

Partai politik menjadi lembaga politik yang jauh dinamis dibandingkan dengan lembaga formal lainnya, sebab di dalam partai secara konseptual melaksanakan berbagai fungsi politik seperti artikulasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik. Partai politik sebagai salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi tentunya tidaklah diskriminatif dalam merekrut atau mengkaderkan para kadernya. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang para kadernya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang para kadernya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbarui.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Mengelola partai politik di era perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini tentu tidak mudah, untuk menghadapi dunia politik diperlukan orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan baik. Kemampuan itu harus dimiliki agar pesan dan misi dapat disampaikan dengan baik, seperti menguasai teknik berdebat dan cara berkomunikasi yang baik dengan publik sehingga pesan-pesan partai tidak hanya bisa diterima dengan baik tetapi misi untuk memajukan dan memenangkan partai harus tercapai, hal ini tentunya sebuah partai harus melakukan pembinaan dan pendidikan politik terhadap kadernya.

Partai politik memiliki kewajiban dan fungsi melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Pasal 13 huruf (e) partai politik juga memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Dengan dasar inilah partai politik harus menjadi salah satu agen pendidikan politik yang mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik tersebut dilaksanakan oleh kader-kader partai. Kader partai politik adalah ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh masing-masing partai. Kalidjernih (2010:75). memberikan definisi kader adalah seorang atau sekelompok orang (elit) dari suatu partai dengan ciri khas, yakni berkomitmen ideologis dan berdisiplin kepada partainya. Kader partai politik memiliki kewajiban dan tugas untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan politik. Semua kader partai politik memiliki tugas yang sama yaitu mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, kadernya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 10 dan pasal 11 memuat tujuan umum dan tujuan khusus partai politik serta fungsi partai politik.

Pembinaan dan pendidikan politik merupakan tuntutan dari perkembangan demokrasi yang saat ini berkembang diberbagai negara termasuk di Indonesia. Melalui pembinaan dan pendidikan politik inilah masa depan politik suatu negara dapat dilihat keberhasilannya. Pembinaan dan pendidikan politik harus dijadikan program dan sebagai salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Mengingat, dengan pemahaman politik yang baik warga negara dan generasi pemimpin suatu negara dapat dijadikan suatu modal awal terciptanya sistem politik suatu negara yang baik. Pendidikan politik menjadi kewajiban dari partai politik sebagai salah satu agen pendidikan politik.

Peran kader Partai Golkar dalam melaksanakan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman politik masyarakat mengenai politik. Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh kader partai Golkar dengan menerapkan srtategi pembinaan dan pendidikan politik yang sesuai dengan sistem dan visi, misi, serta tujuan Partai Golkar. Strategi tersebut diharapkan membantu memudahkan kaderisasi partai Golkar dengan memasukan dan memahamkan masyarakat tentang politik Indonesia, idiologi partai, visi, misi dan arah kebijakan partai Golkar.

Partai Golkar sebagai salah satu partai besar yang ada di Indonesia memiliki basis kader dan simpatisan yang cukup banyak ditambah dengan organisasi pendiri dan yang didirikan (ORSAMENDI). Kader-kader tersebut tersebar hingga tingkat desa dan menjadi salah satu bagian dari sistem politik di Indonesia. Dengan basis masa yang cukup besar inilah diharapkan Partai Golkar mampu membentuk karakter masyarakat yang memenuhi aspek-aspek kewarganegaraan. Masyarakat di Kabupaten Garut yang memenuhi aspek-aspek tersebut akan mampu berpartisipasi

dan bersama-sama menjalankan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun saat ini pelaksanaan pendidikan politik yang diterapkan belum mampu memberikan perubahan pemahaman politik masyarakat. Kecenderungan budaya politik *patro-client* masih banyak ditemui diberbagai kelompok masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Garut.

Masyarakat di wilayah Kabupaten Garut merupakan masyarakat dengan kultur budaya yang masih kuat, sehingga diperlukan pendidikan politik yang baik dan berkelanjutan oleh berbagai pihak. Pendidikan politik tidak hanya menjadi pendidikan yang wajib bagi orang yang telah memiliki hak politik. Pendidikan politik adalah pendidikan yang fleksibel, artinya mampu dilaksanakan kapan saja, dan dimana saja. Oleh karena itu kader partai Golkar harus mampu mengatur dalam memanfatkan momen dan kesempatan itu sebaik mungkin sehingga kader-kader Golkar semakin bertambah yang pada tujuannya adalah untuk mencetak kader-kader militan Golkar.

Kinerja kader partai merupakan suatu kemampuan dan keahlian seseorang memahami tugas dan fungsinya untuk bekerja sama dalam tim yang pada akhirnya akan membawa hasil sesuai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya oleh partai. Di Kabupaten Garut, kinerja kader partai Golkar untuk mendorong terciptanya kader yang berkualitas, berintegritas dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk memajukan partai dinilai belum terealisasi. Salah satu indeks nilai untuk mengukur kinerja kader, yaitu perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Calon Bupati pada tahun 2013 perolehan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut yang berasal dari Partai Golkar pada tahun 2013 belum menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan calon yang diusung oleh Partai Politik yang lain.

Maka dalam hal ini, peneliti menduga ada beberapa faktor masalah, yaitu : Pertama, Pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai politik belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh minimnya pelaksanaan kebijakan yang belum dilakukan secara menyeluruh, intensif dan berkelanjutan sehingga menimbulkan ketidak-efektifan dan ketidak-solidan kader politik dalam memahami dan menjalankan visi dan misi partai dalam hal membangun kesadaran politik baik untuk dirinya sebagai kader partai maupun untuk masyarakat luas. Kedua, Manajemen pembinaan kader politik yang belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh struktur kepengurusan yang kurang diperhatikan, koordinasi antar pengurus kurang terjalin dengan baik, kualitas sumber daya kader partai yang belum memadai, kurang terampil dan jauh dari kualitas yang sesuai dengan harapan partai, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan partai terhadap kadernya. Ketiga, Kinerja kader partai Golkar Kabupaten Garut dapat dikatakan belum efektif, hal ini ditunjukkan oleh pencapaian hasil Pilkada di Kabupaten Garut yang selalu mendapatkan hasil negatif, dikarenakan belum seimbangnya antara tuntutan yang harus dipenuhi dalam menjalankan peran partai dengan dukungan sumber daya yang lain, seperti sumber dana, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan para ahli.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kaderisasi Partai Golkar di Kabupaten Garut sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul : ***"Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kader Partai Politik Terhadap Manajemen Pembinaan Kader Partai Dalam Mewujudkan Kinerja Kader Partai"*** (*Studi kasus kinerja kader Partai Golkar dalam pencapaian hasil pilkada di Kabupaten Garut*).

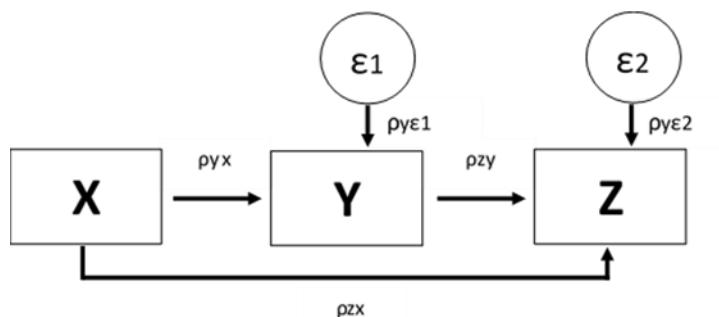
2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survey. Metode ini diharapkan dapat memberikan jawaban bagi pemecahan masalah melalui pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan Antara fenomena yang diteliti.. Menurut Iskandar (2019: 174), metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan suatu fenomena masalah untuk diteliti pada masa ini dengan tujuan menemukan jawaban akan pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif. Adapun teknik survey, dijelaskan Iskandar (2019: 174), sebagai penelitian dengan penggunaan sampel dari suatu populasi dan diukur melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dengan maksud mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah angket berupa kuesioner terstruktur yang bersifat tertutup di mana responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda sesuai petunjuk. Sedangkan skoring satuan pengukuran yang digunakan, dimana pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam setiap pertanyaan penelitian. Tingkat pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan ordinal dan dengan kategori jawaban terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu (sangat baik/baik/cukup/tidak baik/sangat tidak baik). Unit analisis penelitian ini adalah individu dengan sasaran populasi (*population target*) yaitu Kader Partai Golkar yang tersebar di Kabupaten Garut dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling* sehingga didapatkan sampel sejumlah 91 orang. Analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalur (*Path Analysis*).

3. Hasil dan Pembahasan

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “*Terdapat pengaruh dari Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kader Partai terhadap Manajemen Pembinaan Kader Partai untuk Mewujudkan Kinerja Kader Partai*”. Untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan uji melalui analisis jalur (*path analysis*) yang disusun dalam diagram jalur berikut ini:



Gambar 1. Diagram Path

Besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variael dependen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Nilai R-Square

	R-Square
Manajemen Pembinaan Kader Partai (Y)	0,6685
Kinerja Kader partai (Z)	0,7246

Sumber : Hasil Penelitian (2020)

Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi R-Square yang terdapat dua konstruk laten dalam tabel tersebut yang memiliki nilai estimasi R-square diantaranya sebagai berikut:

- Nilai R-Square pada konstruktur endogen Manajemen Pembinaan Kader Partai (Y) adalah sebesar 0,6685. Hal ini menunjukkan bahwa nilai estimasi tersebut adalah sebesar 66,85% sedangkan sisanya sebesar 23,158% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model.
- Nilai R-Square pada konstruktur endogen Kinerja Kader Partai (Z) adalah sebesar 0,7246. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung adalah sebesar 74,26%, sedangkan sisanya sebesar 25,74% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai memberikan pengaruh cukup besar karena adanya sejumlah indikator yang menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sejumlah indikator pelaksanaan kebijakan yang berjalan dengan cukup baik menyebabkan manajemen pembinaan kader partai menjadi cukup terarah, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja kader.

Hasil penelitian memberikan preposisi jawaban bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan maka akan semakin baik pula manajemen dan kinerja. Atau dengan kata lain apabila pelaksanaan kebijakan dilaksanakan secara optimal, maka akan berpengaruh terhadap manajemen dan kinerja, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga berimplikasi pada semakin kuatnya hubungan konseptual dari teori yang melandasi variabel penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa teori memiliki asumsi, dimana keberlakuan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada dimana teori tersebut diterapkan. Besarnya hubungan antara konsep pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai terhadap manajemen pembinaan kader partai dalam mewujudkan kinerja kader partai telah dibuktikan bahwa satu sama lainnya memiliki keterkaitan dan korelasi yang signifikan.

Manajemen yang berjalan dengan baik menyebabkan organisasi (Partai Politik) menjadi lebih terarah dan terkendali, karena dijalankan berdasarkan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan), dan *controlling* (pengawasan) serta pengembangan yang optimal. Manajemen yang baik pada akhirnya akan berdampak terhadap hasil kerja anggota organisasi. Sebagaimana dikemukakan Iskandar (2019: 107) bahwa “manajemen dimaksudkan untuk mengarahkan, membimbing dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga menuju sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Semua ini dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kerja sama dengan orang lain”.

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai menentukan terhadap manajemen pembinaan kader partai yang pada gilirannya berpengaruh

terhadap kinerja kader partai. Kinerja partai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai dan manajemen pembinaan kader partai saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain (ϵ) yang tidak diukur dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor lain itu terbilang besar yakni 33,15%. Besaran faktor lain yang mempengaruhi kinerja kader tersebut disebabkan karena faktor-faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan memberikan kontribusi terhadap kinerja kader partai secara keseluruhan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Iskandar 2017b:151) bahwa pelaksanaan kebijakan program kerja organisasi (X) dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, hasil penelitian yang penulis lakukan semakin memperkuat hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengenai pelaksanaan kebijakan, manajemen dan kinerja diantaranya : *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Moch. Ridwan Fauzi Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan *platform* partai berpengaruh positif terhadap manajemen dan kinerja partai politik sehingga terjadi peningkatan raihan suara partai politik. *Kedua*, penelitian Salahusin tahun 2012 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partai tidak mampu menjalankan fungsinya seperti sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen, pemandu kepentingan, pengendalian konflik dan pengawasan politik dikarenakan manajemen partai politik yang kurang baik. *Ketiga*, Penelitian Parhan tahun 2017 dengan hasil penelitian yaitu secara simultan variabel pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu memberikan pengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel kinerja untuk mewujudkan kualitas pemilihan umum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis utama : Hipotesis nihil (H_0) ditolak dan Hipotesis Kerja (H_1) diterima. Temuan-temuan permasalahan penting dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel manajemen pembinaan kader partai dan variabel kinerja kader partai. *Kedua*, Pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen pembinaan kader partai. *Ketiga*, Manajemen pembinaan kader partai berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kinerja kader partai. *Keempat*, Pelaksanaan kebijakan pembinaan kader partai berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kinerja kader partai.
- b. Hasil penelitian berimplikasi terhadap teori, yakni semakin kuatnya hubungan konseptual dari teori yang melandasi variabel penelitian. Keeratan hubungan antara konsep pelaksanaan kebijakan, manajemen dan kinerja kader dibuktikan bahwa satu sama lain saling berkaitan dan memiliki korelasi yang signifikan.
- c. Selain implikasi pada teori, hasil penelitian juga berimplikasi kepada program pembinaan kader partai bahwa agar kinerja kader dapat terwujud secara maksimal, maka perlu diperhatikan faktor pelaksanaan kebijakan dan manajemen pembinaan kader.

Daftar Pustaka

- DPD Partai GOLKAR Kabupaten Garut. 2018. *Daftar Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2018*
- Fauzi, Moch Ridwan. 2013. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Platfrom Partai Politik Dan Manajemen Partai Politik Terhadap Kinerja Kader Partai Politik Untuk Peningkatan Raihan Suara Partai Politik Di Kabupaten Garut*. Jurnal Ilmu Sosial. Online Tersedia : https://www.academia.edu/3138367/Pengaruh_Pelaksanaan_Kebijakan_Platform_Partai_Politik_Dan_Manajemen_Partai_Politik_Terhadap_Kinerja_Kader_Partai_Politik_Untuk_Peningkatan_Raihan_Suara_Partai
- Iskandar, Jusman, 2019. *Bunga Rampai Administrasi Negara*, Puspaga, Bandung.
- Iskandar, Jusman. 2017. *Dinamika kelompok, organisasi dan komunikasi sosial*. Garut : Pustaka Program Pascasarjana, Universitas Garut
- Kalidjernih, F. K. 2010. *Kamus Studi Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung : Widya Aksara
- Parhan. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu untuk Mewujudkan Kualitas Pemilu*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 02; 2017; 205-218 Online : <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/174/165>
- Salahudin. 2012. *Analisis kinerja partai politik dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah*. Jurnal Ilmu Politik. Online : <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/1567>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik